

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN	ix
SINGKATAN	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Peran DPR Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.....	12
1. Cabang Kekuasaan Legislatif	12
2. Fungsi DPR dalam Implementasi Prinsip Check and Balances.....	15
3. Fungsi DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara.....	17
B. Pengelolaan BMN	19
1. Tinjauan Umum BMN	19
2. Kewenangan Pengelolaan BMN	22
3. Kebijakan Pengelolaan BMN	23
4. Kebijakan Pemindahtanganan BMN.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Bahan Penelitian	29

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32
D. Analisis Data	33
E. Jadwal Penelitian.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pergeseran Kewenangan DPR dalam Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN Pasca Terbitnya UU IKN	35
1. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Pemindahtanganan BMN.	36
a. Periode Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 - 17 Agustus 1950)	37
b. Periode UUD Sementara Republik Indonesia (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)	40
c. Periode UUD Republik Indonesia (5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999) ..	41
2. Pengaturan dan Peran DPR dalam Pemindahtanganan BMN.....	48
a. Kebijakan Hukum Terbuka Pengelolaan BMN	49
b. Pembentukan UU Perbendaharaan Negara dan Pengaturan mengenai Peran DPR dalam Pengelolaan BMN	54
c. Kewenangan Persetujuan DPR atas Pemindahtanganan BMN Dalam UU Perbendaharaan	60
3. Perubahan Kewenangan DPR dalam Pemindahtanganan BMN	66
a. Tujuan dan Urgensi Pembentukan UU IKN	66
b. Alasan Perubahan Pengaturan Kewenangan DPR dalam Pemindahtanganan BMN	73
c. Potensi Optimalisasi BMN Untuk Mendukung Pendanaan Pembangunan IKN.....	77
B. Implikasi Hukum Pergeseran Pengaturan Pengelolaan BMN Pasca Terbitnya UU IKN.....	86
1. Antinomi Pengaturan Persetujuan Pemindahtanganan BMN	87
2. Persoalan Pengawasan dan Melemahnya Akuntabilitas Pemindahtanganan BMN.....	102
3. Simplifikasi Proses dan Optimalisasi Pemindahtanganan BMN Untuk Pendanaan Pembangunan IKN	110
BAB V KESIMPULAN.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	126